



## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan

Nadia Wulandari<sup>1\*</sup>, Abdullah Qiqi Asmara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

[nadiawulandari370@gmail.com](mailto:nadiawulandari370@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Alamat: Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat,  
Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: [nadiawulandari370@gmail.com](mailto:nadiawulandari370@gmail.com)

**Abstract.** *This research focuses on the implementation of flood management policies in South Tangerang City with suboptimal flood management problems. The problems that were found were that the coordination carried out by stakeholders was tentative, there were obstacles in communication on the condition of the social environment, especially in terms of public awareness of protecting the environment, was still lacking because rubbish was still found in rivers and canals. The aim of this research is to determine the extent of implementation of flood management policies in South Tangerang City. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, and data is obtained through observation, interviews and documentation. This research uses the Van Meter and Van Horn theory with 6 (six) indicators, namely: a) Policy Size and Objectives; b) Resources; c) Characteristics of The Implementing Agent; d) Attitude and Tendencies; e) Inter-Organizational Communication and Implementation Activities; f) Economic, Social and Political Environment. The result of the study shows that policy measures and standards are appropriate but there needs to be an increase in disaster outreach and training. Then the quantity or number of Task Forces to go into the field is still insufficient. The availability of an organizational structure and regulations responsible for implementing flood management is quite good. Policy implementers' understanding of flood management policies is quite good and has received a positive response from policy implementers. Apart from that, the communication that exists between OPDs and village officials is quite good, characterized by deliberation. The economic, social and political environmental conditions are quite good, but there needs to be an increase in public awareness of protecting the environment by not throwing rubbish into rivers or waterways.*

**Keywords:** *implementation, policy, flood management*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan permasalahan penanggulangan banjir yang belum optimal. Adapun permasalahan yang menjadi temuan adalah koordinasi yang dilakukan oleh *stakeholder* bersifat tentatif, adanya hambatan dalam komunikasi serta kondisi lingkungan sosial khususnya dalam hal kesadaran masyarakat menjaga lingkungan masih kurang karena masih ditemukannya sampah di aliran sungai ataupun disaluran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 (enam) indikator, yaitu: a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; b) Sumber Daya; c) Karakteristik Agen Pelaksana; d) Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana; e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukuran dan standar kebijakan sudah sesuai namun perlu adanya peningkatan pada sosialisasi dan pelatihan kebencanaan. Kemudian kuantitas atau jumlah Satgas untuk turun ke lapangan masih kurang. Ketersediaan struktur organisasi dan juga aturan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penanggulangan banjir sudah cukup baik. Pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan penanggulangan banjir sudah cukup baik dan mendapat respon positif dari pelaksana kebijakan. Selain itu, komunikasi yang terjalin baik antar OPD ataupun perangkat desa sudah cukup baik ditandai dengan adanya musyawarah. Adapun kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan terkait kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah pada aliran sungai atau saluran air.

**Kata kunci:** Implementasi, kebijakan, penanggulangan banjir.

## 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis dikelilingi oleh Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Benua Australia, dan Benua Asia. Selain itu, Indonesia terletak pada area 3 lempeng tektonik utama bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Wilayah Indonesia juga dilewati dengan garis ekuator atau dikenal dengan sebutan garis khatulistiwa sehingga menyebabkan wilayah Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan bencana yang disebabkan baik faktor alam, non alam ataupun manusia.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sampai tahun 2022 banjir masih menjadi bencana dengan jumlah yang paling banyak terjadi di seluruh daerah Indonesia dengan total sekitar 1.531 kejadian. Selain faktor alam, banjir juga disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk sehingga terjadi perubahan pada penggunaan lahan dan semakin berkurangnya area resapan air ke dalam tanah. Selain itu juga, banjir disebabkan oleh faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seperti membuang sampah di aliran sungai.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dibuat sebagai upaya dalam memberikan kerangka hukum pada tindakan penanggulangan dari mulai tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka tujuan dari UU No. 24 Tahun 2007 ini untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten dengan luas wilayah sekitar 164.85,47 hektar serta terdapat 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan. Menurut (Wulandari & Salam, 2022), Kota Tangerang Selatan memiliki 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu sungai Pesanggrahan, Cisadane dan Kali Angke. Selain itu, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% dan memiliki ketinggian wilayah sekitar 0—25 mdpl. Hal ini menyebabkan beberapa daerah di Kota Tangerang Selatan sering mengalami banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, terhitung sejak bulan Januari-Desember 2022 telah terjadi sekitar 307 bencana dan yang paling mendominasi adalah banjir. Berikut data kejadian bencana banjir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022:

**Tabel 1.** Kejadian Bencana Tahun 2022 (Januari-Desember)

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian
1.	Ciputat	56
2.	Ciputat Timur	10
3.	Pamulang	36
4.	Pondok Aren	76
5.	Serpong	7
6.	Serpong Utara	12
7.	Setu	6
Total		203

*Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan*

Banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang cukup tinggi, saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi karena adanya pendangkalan dan sumbatan, minimnya area resapan air karena adanya alih fungsi lahan seperti banyaknya bangunan yang berdiri tanpa adanya izin di area-area yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau area resapan dan aliran sungai yang mengalami penyempitan karena banyaknya pembangunan yang terjadi disekitar bibir sungai atau situ, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan seperti membuang sampah di aliran sungai.

Dalam merespon permasalahan bencana tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun suatu Peraturan Daerah (PERDA) untuk penanggulangan bencana guna mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Perihal kebijakan perlu adanya peningkatan dan kebaruan untuk acuan dalam menanggulangi banjir di Kota Tangerang Selatan. Dalam kebijakan tersebut terdapat beberapa tugas dan wewenang pemerintah dalam penanggulangan banjir seperti, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Perihal penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pengurangan resiko bencana diketahui bahwa kegiatan pelatihan, pemberian bantuan, pemasangan rambu titik kumpul belum berjalan secara menyeluruh khususnya ke daerah yang sering mengalami banjir. selain itu juga belum disahkannya Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat dinilai bahwa kebijakan penanggulangan banjir belum terimplementasi dengan baik dan perlu adanya peningkatan karena, beberapa titik di Kota Tangerang Selatan masih terdapat banjir saat musim hujan dan masih adanya hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Maka permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, khususnya terkait bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan yang sampai tahun 2022 masih sering terjadi banjir dan berfokus pada ke 3 (tiga) tahapan manajemen bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Van Meter & Van Horn (1975) dalam (Agustino, 2016) menjelaskan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok atau pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn dalam (Agustino, 2016) ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut realistis dengan sosio-kultur pada tingkat pelaksana kebijakan. Kebijakan akan sulit di realisasikan apabila ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan dalam mengimplementasi kebijakan dapat dilaksanakan tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial dan waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan agen pelaksananya. Selain itu, perlu memperhitungkan luas wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menentukan agen pelaksananya. Semakin luas wilayah cakupan implementasi kebijakan maka semakin besar pula agen yang terlibat.

d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Salah satu hal terpenting adalah pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Sebab, keberhasilan implementasi kebijakan harus

disertai dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh (Prof. Budi Winarno, DRS., MA., 2016). Selain itu, keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik dapat dipengaruhi dari sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. Hal ini karena, kebijakan yang dilaksanakan bukan dari formulasi warga yang sangat mengenal dan mengetahui persoalan atau permasalahan yang dirasakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan maka koordinasi menjadi syarat utama. Semakin baik koordinasi dan komunikasi pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Selain itu, koordinasi juga dapat dilaksanakan karena merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat, maka akan semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi (ABDAL, 2015).

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter & Van Horn menawarkan dalam lingkungan ini, sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab utama dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Maka perlu sekali memperhatikan tingkat kondusif pada lingkungan eksternal tersebut.

## **Banjir**

Banjir menurut Ward 1978 dalam (Qodriyatun, 2020) adalah massa air yang diproduksi dari limpasan air pada permukaan tanah yang lebih tinggi serta secara alami meluap dan tidak dapat ditampung sehingga menimbulkan genangan. Sedangkan menurut (Rahmaniah, 2021) banjir merupakan suatu peristiwa adanya genangan yang ada di daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa alam yang terjadi akibat faktor alam atau non alam yang dimana air tersebut tidak dapat meresap dan ditampung sehingga menimbulkan genangan. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir yang dijelaskan oleh Kodoatie dan Sugiyanto 2022 dalam (Ka'u et al., 2021) ada 2 yaitu: 1. Banjir alami yang dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan air pasang. 2. Banjir oleh tindakan manusia dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan seperti perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan Kawasan

pemukiman disekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir serta perencanaan sistem pengendali banjir yang kurang tepat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengklarifikasikan suatu gejala atau fenomena yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti akan mengumpulkan dan menyusun data dengan menguraikan atau mendeskripsikan data yang telah di dapat terkait implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian data; 3) Penarikan Kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengetahui suatu kebijakan terimplementasi dengan baik atau tidak dapat dilihat dengan beberapa cara seperti pada penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn yang dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

#### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn ukuran dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena dapat memengaruhi kinerja implemementasi kebijakan sehingga perlu adanya dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penanggulangan bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan mengacu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat 3 (tiga) tahapan penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selain itu juga terdapat regulasi atau standar kebijakan lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra BPBD bahwa pada tahap ini terdapat beberapa permasalahan seperti pelayanan informasi rawan bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal yang ditandai dengan belum adanya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan belum menyeluruhnya program pencegahan seperti sosialisasi dan pelatihan. BPBD merasa kesulitan karena target dalam melakukan sosialisasi sebelum adanya Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah hampir seluruh masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang di dalamnya termuat beberapa program salah satunya adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dengan sasaran terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana. Pada program tersebut hal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan pemasangan rambu serta papan informasi publik.

b. Tahap Tanggap Darurat

Pada tahap tanggap darurat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya korban jiwa dan ketika terjadi bencana dapat mengevakuasi orang-orang yang terdampak dengan selamat. Pada tahap ini, ketika terjadi bencana pada suatu wilayah pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Desa, dan seluruh stakeholder sudah melakukan koordinasi untuk memperlancar upaya penanggulangan banjir dengan melakukan evakuasi dan penyelamatan korban. Ketika terjadi banjir Perangkat Desa dan masyarakat menghubungi kontak yang sudah terdaftar untuk melakukan pengaduan sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak lain dapat langsung turun ke lapangan. Selain upaya penyelamatan dan evakuasi korban, ketika terjadi bencana pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membangun posko sementara untuk pengungsi dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk memberikan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak.

c. Tahap Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana ini terdapat permasalahan pada lamanya anggaran yang digunakan untuk pemulihan bangunan sebab dalam proses pengeluaran anggaran perlu adanya perencanaan-perencanaan untuk mencari solusi terbaik. Lama turunnya anggaran tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan banjir khususnya pada saat perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat banjir sehingga diperlukan peningkatan efisiensi dalam alokasi anggaran dan proses administrasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur

pasca banjir. Dalam mensiasati hal tersebut maka dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan penanganan yang sifatnya sementara dengan memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana.

Berdasarkan 3 (tiga) tahapan manajemen bencana diatas, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan banjir sudah terdapat regulasi atau dasar hukum yang digunakan sebagai acuan mulai dari tingkat nasional, pusat, sampai tingkat daerah. Selain itu BPBD, penanggulangan banjir juga dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan melakukan upaya perbaikan-perbaikan teknis. Namun hal tersebut belum efektif, karena kurangnya tindakan tegas dari pemerintah untuk menertibkan dan memberikan sanksi terhadap bangunan liar ditanah milik pemerintah yang seharusnya bisa dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) untuk penyerapan air.

### **Sumber Daya**

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya baik sumber daya manusia dan non manusia karena menjadi salah satu faktor terpenting dalam implementasi kebijakan. Terdapat beberapa sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: 1) Sumber daya manusia, dilihat dari segi kualitas yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan sudah banyaknya staf yang berpengalaman pada bidang kebencanaan dan adanya pelatihan-pelatihan terkait kebencanaan yang diberikan kepada satgas sehingga setiap personil sudah memiliki bekal untuk turun ke lapangan. Di sisi lain, dari segi kuantitas yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai karena hanya memiliki 20 satuan tugas (satgas). Kurangnya sumber daya manusia yang ada tersebut dapat menjadi penghambat untuk menangani bencana di Kota Tangerang Selatan yang cukup luas dan ketika terjadi bencana dalam jumlah banyak secara bersamaan. Oleh karena itu, BPBD Kota Tangerang Selatan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk turun ke lapangan dalam melakukan evakuasi; 2) Sumber Daya anggaran, dalam upaya penanggulangan bencana akan berjalan efektif jika didukung dengan anggaran yang mencukupi. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat alokasi dana yang disediakan khusus untuk bantuan yang berkaitan dengan kebencanaan. Dana tersebut dapat digunakan saat terjadi bencana atau dalam situasi tertentu yang memerlukan

intervensi darurat. Penggunaan dana tersebut diatur dan dialokasikan melalui dana Belanja Tidak Terduga; 3) Sarana dan Prasarana, dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tangerang Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti perahu karet, dayung, alat pelindung diri, dan lain sebagainya.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik organisasi merupakan pusat perhatian agen pelaksana yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan karena dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksana. Pada indikator ini dapat dilihat dari bagaimana struktur organisasi yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir. Karakteristik agen pelaksana dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan juga terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai.

### **Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Pada indikator ini komitmen dari pelaksana kebijakan terhadap program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat dari pemahaman dan respon terhadap kebijakan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan sebagai implementor telah memahami terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Hal tersebut ditandai dengan program atau kegiatan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah terlaksana dengan cukup baik dan memberikan dampak positif berupa semakin berkurangnya jumlah kejadian banjir di Kota Tangerang Selatan, dan tidak adanya korban jiwa.

Selain itu adanya kebijakan penanggulangan banjir ini mendapat dukungan dan respon positif dari para pelaksana kebijakan. Hal ini ditandai dengan kinerja para pelaksana kebijakan yang sesuai dengan acuan atau pedoman dasar dalam bekerja serta keberhasilan yang sudah dicapai. Menurut (Dirwan et al., 2017) implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, kesepakatan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari pemahaman para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tetapi juga adanya dukungan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif apabila implementor sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian suatu tujuan memahami dengan baik standar dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam menentukan keberhasilan implementasi maka yang menjadi syarat utama adalah adanya komunikasi dan juga koordinasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan sudah melakukan komunikasi dan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak pemerintah, masyarakat, relawan kebencanaan dan pihak swasta yang ikut serta setiap kegiatan mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Namun dalam hal merespon permasalahan pembangunan yang terjadi dan banyaknya alih fungsi lahan, dinas yang memiliki wewenang dalam memberikan izin mendirikan bangunan belum melakukan koordinasi dan melibatkan pihak-pihak yang dianggap penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aktivis lingkungan yang memahami lebih detail lokasi-lokasi yang berpotensi banjir. Sehingga perlu adanya perencanaan yang matang terkait pemberian izin mendirikan bangunan dari dinas terkait dengan melibatkan beberapa pihak agar permasalahan alih fungsi lahan dapat diminimalisir.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal yang perlu diperhatikan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan eksternal meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik.

Pada aspek lingkungan ekonomi terdapat dukungan ekonomi berupa adanya bantuan baik barang maupun jasa dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat terjadi banjir. Pada aspek sosial terlihat adanya dukungan dari masyarakat dengan ikut terlibat dalam kegiatan penanggulangan banjir seperti mengikuti pelatihan dan sosialisasi, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan mengadakan kegiatan kerja bakti. Serta pada aspek politik adanya dukungan elit politik yang ikut serta dalam penanggulangan banjir dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Aspek-aspek tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, perlu adanya

peningkatan kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga sungai atau kali dengan tidak membuang sampah pada aliran sungai. Sebab, masih ditemukannya sampah rumah tangga di aliran sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi terhambat. Pemerintah daerah ataupun aktivis lingkungan sudah memberikan sanksi kepada masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan, namun hal tersebut tidak memberikan efek jera.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan yang dilihat dari ke 6 (enam) indikator tersebut sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menanggulangi banjir, kualitas sumber daya yang baik, para pelaksana atau implementor memahami dan memberikan respon positif terhadap kebijakan, adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar stakeholder dan masyarakat, serta adanya dukungan ekonomi, sosial dan politik dalam melaksanakan penanggulangan banjir.

Namun hal tersebut tentunya saja perlu adanya evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Tangerang Selatan. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat, perlu adanya tindak tegas dari pemerintah daerah untuk merespon dan mengatasi permasalahan alih fungsi lahan, perlu adanya keterlibatan beberapa pemangku kepentingan dan aktivis dalam hal pengawasan dan perencanaan pembangunan, serta perlu adanya kegiatan atau program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan pengelolaan sampah pada TPS 3R.

## **DAFTAR REFERENSI**

- ABDAL, M. S. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep kebijakan Publik). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revi). Alfabeta.
- Apriadi, E. P. (2022). Bencana Banjir Di Tangerang Selatan. Variabanten.Com. <https://variabanten.com/762/bencana-banjir-di-tangerang-selatan-oleh-ekaprasyo-apriadi-mahasiswa-magister-hukum-universitas-pamulang.html>
- Dany, F. W. W. (2022). Penanggulangan Banjir Tangerang Selatan Terjegal Lahan. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/09/14/penanggulangan-banjirtangerang-selatan-terjegal-lahan>

Dirwan, F., Mufti, M. I., & Daswati. (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 5(12), 155–164.

Ka'u, A. A., Takumansang, E. D., & Sembel, A. (2021). Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Spasial*, 8(3), 291–302.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1590>

Rahmaniah. (2021). Analisis Penyebab Bencana Alam Banjir yang Ada di Wilayah Indonesia. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 5(1)

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 8, 534–548